



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI BOOM
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

TESIS

Oleh
Antonio Cornelis
NIM 130920101018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI BOOM
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi

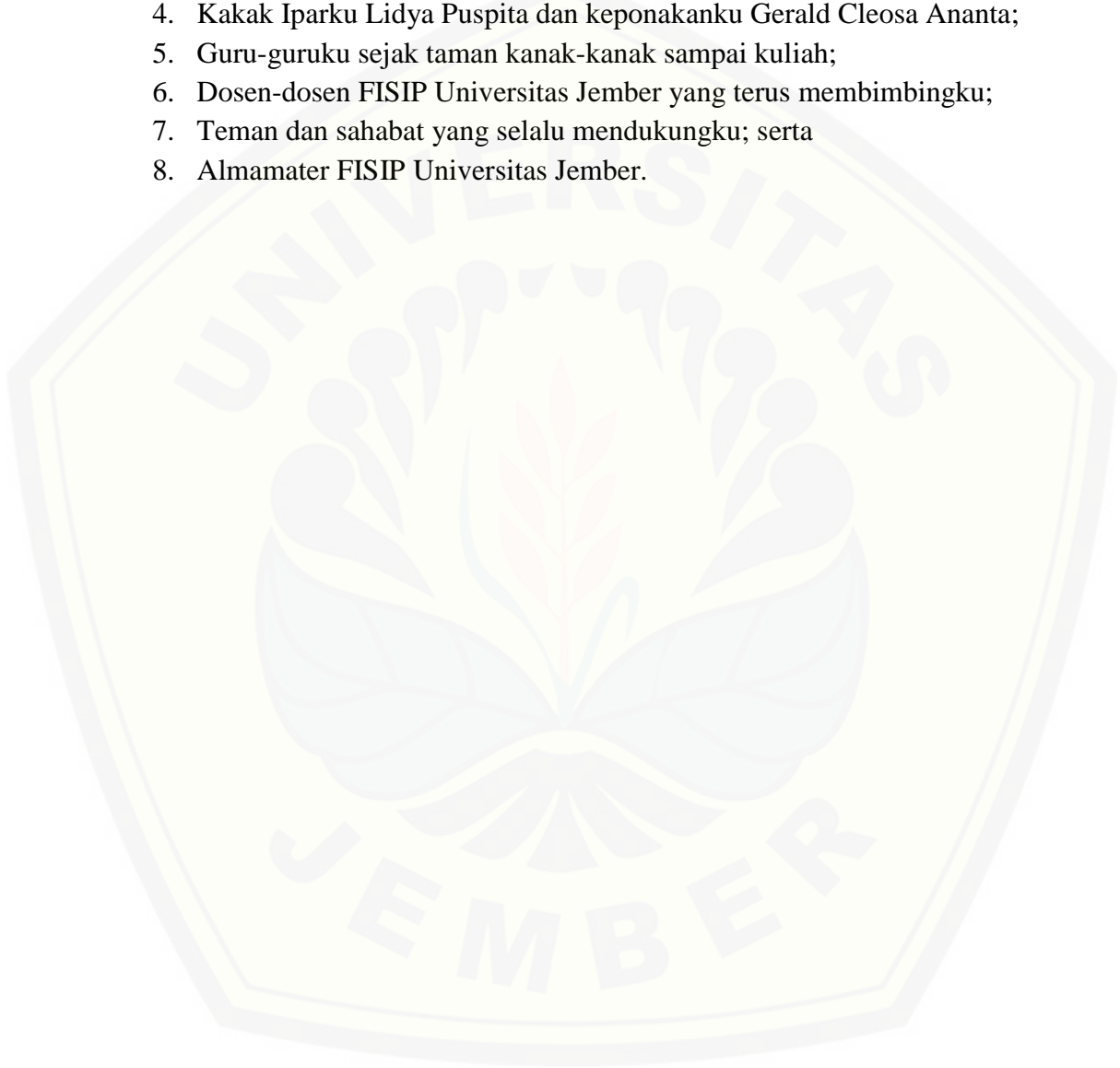
Oleh
Antonio Cornelis
NIM 130920101018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Bapakku Ngatijan yang telah mendidikku dari kecil;
2. Ibuku Suryati yang telah merawatku dari kecil;
3. Kakakku Andrias Eko Yulianto yang terus memberi semangat;
4. Kakak Iparku Lidya Puspita dan keponakanku Gerald Cleosa Ananta;
5. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai kuliah;
6. Dosen-dosen FISIP Universitas Jember yang terus membimbingku;
7. Teman dan sahabat yang selalu mendukungku; serta
8. Almamater FISIP Universitas Jember.



HALAMAN MOTTO

Berbahagiaalah dia
yang makan dari keringatnya sendiri
bersuka karena usahanya sendiri
dan maju karena pengalamannya
sendiri¹



¹ Toer, Pramoedya Ananta. 1980. Bumi Manusia (Mama/Nyai Ontosoroh). Hal 39. Jakarta: Hastra Mitra

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Antonio Cornelis

NIM : 130920101018

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan, saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademi jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juni 2017

Yang menyatakan,

Antonio Cornelis

NIM 130920101018

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI BOOM
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh

**Antonio Cornelis
NIM. 130920101018**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Djoko Poernomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi” karya Antonio Cornelis telah diuji dan disahkan pada:
hari/tanggal : Jumat, 9 Juni 2017
tempat : Fakultas Fisip Universitas Jember

Tim Penguji:
Penguji Utama/Ketua Penguji,

Dr. Sasongko, M.Si
NIP. 19570407 198609 1 001

Anggota I,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 19580510 198702 2 001

Anggota III,

Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A
NIP. 19580609 198503 2 003

Anggota II,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 19580810 198702 1 002

Anggota IV,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si
NIP. 19600219 198702 1 001

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 19580810 198702 1 002

RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi; Antonio Cornelis, 130920101018; 2017: 80 Halaman; Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Biaya hidup yang cenderung lebih tinggi di negara tertentu, mendorong orang untuk melakukan wisata ke daerah lain yang biaya hidupnya lebih rendah. Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu tujuan wisata karena biaya hidup murah sedangkan kawasan Pantai Boom menjadi salah satu destinasi wisata yang diunggulkan karena kekhasan alamnya. Akan tetapi, terjadi perlambatan ekonomi karena beberapa sektor usaha mengalami penurunan seperti sektor pariwisata sedangkan sektor pertanian masih menjadi primadona. Pengelolaan kawasan Pantai Boom perlu dilaksanakan untuk menopang sektor pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan pengelolaan Kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi agar berjalan sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya kemudian dicocokkan antara kenyataan dengan teori yang berlaku sehingga makna gejala sosial yang terjadi menjadi jelas. Beberapa model teori implementasi kebijakan seperti model Mazmanian dan Sabatier, model Van Horn dan Van Metter, serta model Grindle, penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn karena lebih menekankan kinerja kebijakan. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles and Huberman Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum bisa dikatakan berjalan baik karena komunikasi antar badan pelaksana masih terdapat kepentingan sektoral daripada mencapai tujuan bersama dan budaya masyarakat masih ingin tradisional daripada konsep modern berbasis ekowisata.

SUMMARY

Policy Implementation to Managing Boom Coastal Areas in Banyuwangi District; Antonio Cornelis, 130920101018; 2017: 80 pages; Study Program of Administration Science's Master, The Faculty of Social and Political Sciences, Jember University.

Living costs tend to be higher in certain countries, encouraging people to make trips to other areas of its life at lower costs. One of tourist destination is Banyuwangi District because it's the lower costs while Boom Becah Areas is become one of leading tourist destination because its nature. However, economy deceleration was happened, because some sector had degradation like tourism's sector but agriculture's sector had superior. Because of that, managing Boom Coastal Areas is important to sustain tourism's sector. This study used qualitative research method to knows the phenomenon occurs in policy implementation to managing Boom coastal areas in Banyuwangi District using script interview, field notes, and other official documents later it can be matched between the reality with the theory so that the meaning of social symptoms becoming clear. Some model of policy implementation is Mazmanian and Sabatier's model, Van Horn and Van Metter's model, and Grindlle's model, this research used Van Horn and Van Metter's model because this model more simpthesis performance's policy. The research data retrieved from observation, in-depth interview, documentation, and triangulation then it has analyzed by Miles and Huberman's interactive analyze. The research results showed that policy implementation had not been going well because communication between the implementors had sectoral interest rather than public interest and the local community culture want traditional concept rather than modern ecotourism-based concept.

PRAKATA

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapakku Ngatijan yang selalu mendoakan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) ini;
2. Ibuku Suryati yang selalu mendoakan penulis untuk terus semangat menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) ini;
3. Kakakku Andrias Eko Yulianto, kakak iparku Lidya Puspita, keponakanku Gerald Cleosa Ananta, yang memberikan penulis semangat pantang menyerah;
4. Dr. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Nur Dyah Gianawati, M.Si yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis hingga menyelesaikan tesis ini;
5. Semua dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi yang telah mengajar dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Teman dan sahabat baik di lingkungan keluarga maupun kantor yang selalu memberikan semangat kepada penulis; serta
7. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebut satu per satu.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat di kemudian hari nanti.

Jember, Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN/ <i>SUMMARY</i>	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Masalah	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori dan Konsep	7
2.1.1 Teori Kebijakan.....	7
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan.....	9
2.1.3 Pengelolaan Wilayah Pesisir	16
2.1.4 Pariwisata	18
2.1.5 Pemerintah Daerah.....	21
2.2 Landasan Normatif	23
2.2.1 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	23
2.2.2 Pariwisata	24

2.2.3 Pemerintahan Daerah	25
2.3 Penelitian Terdahulu.....	25
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Metode Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Penentuan Informan.....	32
3.4 Pengumpulan Data.....	35
3.5 Analisa Data	40
3.6 Validitas/Keabsahan Data.....	43
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum	44
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	44
4.1.2 Gambaran Umum Kawasan Pantai Boom Banyuwangi	45
4.1.3 Kawasan Pantai Boom sebagai Potensi Maritim Banyuwangi	47
4.2 Hasil Penelitian.....	53
4.2.1 Pelaksana Kebijakan yang Mengoperasikan Program di lapangan	53
4.2.2 Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kebijakan	58
4.2.3 Pemanfaatan Sumber daya yang Tersedia.....	62
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	67
4.3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi	67
4.3.2 Interaksi Masyarakat Lokal dan Wisatawan	69
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72
Daftar Pustaka	73
Pedoman Wawancara	79
Lampiran-lampiran.....	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1	Data Penyelamatan Penyu Berdasarkan Pantai di Banyuwangi.....48
4.2	Pelatihan Pariwisata periode 2015-201649
4.3	<i>Event</i> Banyuwangi Festival yang diselenggarakan di Kawasan Pantai Boom Tahun 2012-2105..... 50
4.4	Jumlah Hotel dan Penginap Tahun 2012-2015..... 51
4.5	Data Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Objek Wisata Per Januari-Juli Tahun 2016..... 52
4.6	Presentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Objek Wisata Periode Januari-Juli Tahun 2016..... 57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Grafik Prosentase Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang 2010-2014.....	2
1.2 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Banyuwangi tahun 2014.....	2
1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi berdasarkan Lapangan Usaha tahun 2012-2014.....	3
3.1 Operasionalisasi Faktor Implementasi Kebijakan.....	30
3.2 Model Analisis Interaktif Miles and Huberman, Johnny Saldana, 2013.....	40

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya melimpah ruah. Luasan wilayah yang terdiri dari tiga perempat wilayah lautan memberikan potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata dan peternakan. Beberapa potensi Indonesia yang mulai berkembang pesat adalah sektor pariwisata. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2011) mengeluarkan pernyataan bahwa:

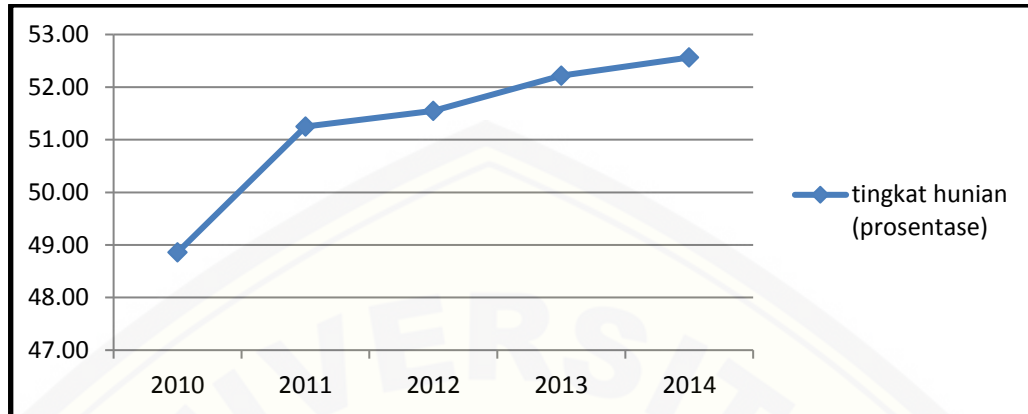
Kegiatan pariwisata menjadi salah satu industri yang cukup menjanjikan di Indonesia. Kekayaan alam dan budaya menjadi komponen penting dalam pariwisata Indonesia. Selain itu, pada tahun 2009 pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit.

Indonesia mengalami perkembangan pariwisata yang pesat. Kekayaan budaya dan alam yang beraneka ragam menjadi daya tarik para wisatawan. Selain itu, biaya hidup yang cenderung lebih tinggi di Negara tertentu, mendorong orang untuk melakukan wisata ke daerah lain yang biaya hidupnya lebih rendah. Badan Pusat Statistik (2012) melakukan survey biaya hidup untuk menentukan rataan biaya hidup di kota-kota yang ada di Indonesia yakni:

Dari 82 kota Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 oleh BPS diperoleh hasil bahwa Jakarta merupakan kota dengan biaya hidup tertinggi, yakni Rp 7.500.726 per bulan dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,1. Sedangkan Banyuwangi merupakan kota dengan biaya hidup terendah, yakni Rp 3.029.367 per bulan dengan rata-rata anggota rumah tangga 3,6. Secara nasional, rata-rata biaya hidup adalah sebesar Rp 5.580.037 per bulan.

Biaya hidup yang rendah berdasarkan survei tersebut di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi menjadi tujuan para wisatawan untuk menghabiskan liburan serta membelanjakan uangnya sehingga perekonomian masyarakat meningkat. Usaha perhotelan juga meningkat karena para wisatawan menginap di hotel atau penginapan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

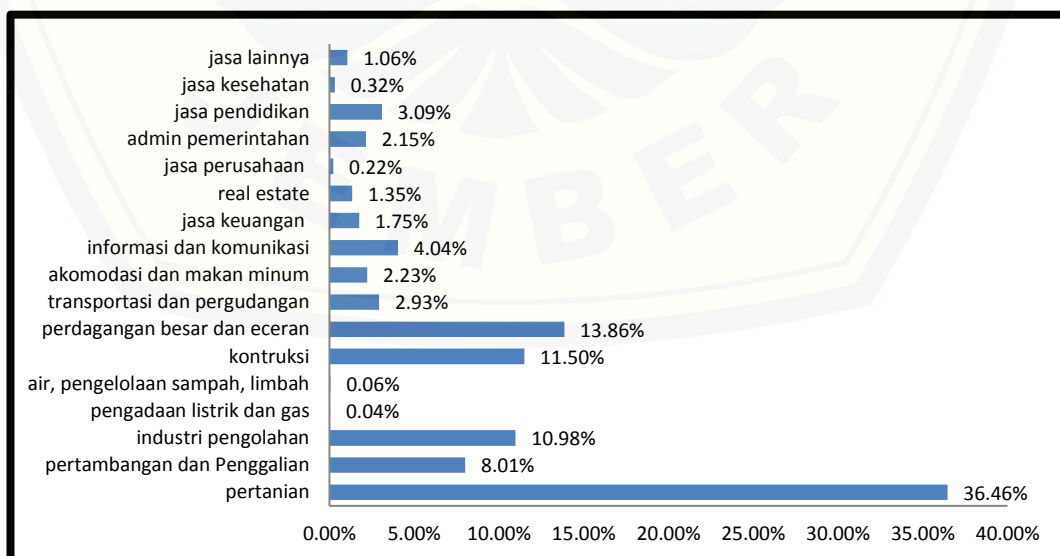
Gambar 1.1 Grafik Prosentase Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang Tahun 2010-2014



(Sumber: Badan Pusat Statistik Banyuwangi, tahun 2015, diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel berbintang di Kabupaten Banyuwangi meningkat dari 48,86% pada tahun 2010 meningkat menjadi 52,56% pada tahun 2014. Meningkatnya hunian hotel tidak berbanding lurus dengan kontribusinya sebagai penopang sektor pariwisata. Tren yang terjadi adalah sektor pariwisata belum memberikan hasil yang optimal karena lapangan usaha yang tersedia masih belum menarik minat masyarakat.

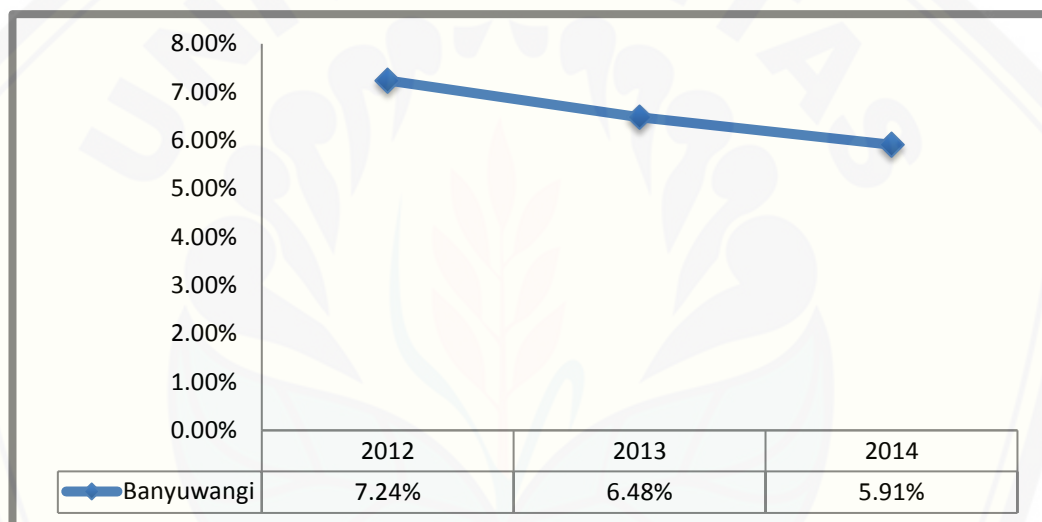
Gambar 1.2 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Banyuwangi Tahun 2014



(Sumber: Banyuwangi dalam Angka 2015, diolah)

Berdasar pada gambar 1.2 pada tahun 2014 struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 36,46% sebagai sektor tradisional dan peringkat kedua perdagangan besar dan eceran sebesar 13,86% sebagai salah satu bagian dari sektor pariwisata. Selain itu, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 2,23% juga bagian dari sektor pariwisata. Masih minimnya kontribusi yang diberikan sektor pariwisata secara tidak langsung menurunkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi berdasarkan Lapangan Usaha tahun 2012-2014



(Sumber: Banyuwangi Dalam Angka 2015, diolah)

Berdasar pada gambar 1.3 selama tiga tahun terakhir (2012-2014) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami tren penurunan yang cukup drastis dari tahun 2012 sebesar 7,24% menjadi 5,91% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perlambatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Perlambatan ekonomi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk segera ditindaklanjuti.

Tren penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena beberapa sektor usaha belum memberikan kontribusi yang cukup terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya sektor pariwisata yang masih belum optimal memberikan kontribusi. Kawasan Pantai Boom menjadi salah satu

tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan guna menunjang sektor pariwisata yang masih lesu. Posisinya yang berada di selat Bali juga menjadi strategis karena daerah sekitar selat Bali merupakan bagian dari studi *Coral Triangle Initiative*, suatu program penyelamatan terumbu karang (www.coraltriangleinitiative.org, diakses pada 9 Juni 2015). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 pasal 64 ayat (5) huruf (a) juga menyebutkan bahwa pantai Boom masuk dalam bagian Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I karena memiliki kekhasan daya tarik alamnya.

Upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT. Pelindo III guna mengelola kawasan tersebut agar menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Tentunya kerjasama tersebut untuk menyelaraskan program kegiatan kedua belah pihak dalam pengelolaan kawasan Pantai Boom guna mendukung pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Perjanjian kerjasama Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Boom antara Pelindo III dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/61/429.012/2015 jo Nomor HK.0501/04/TWI-2015 pasal 3 ayat (2), ruang lingkup kerjasama yang nantinya dikelola oleh kedua belah pihak antara lain:

- a. Pengelolaan tiket masuk,
- b. Pengelolaan jasa parkir kendaraan,
- c. Pengelolaan untuk kegiatan usaha kecil di Kawasan Pantai Boom,
- d. Pemeliharaan kebersihan dan pertamanan di Kawasan Pantai Boom sekitarnya,
- e. Pemeliharaan dan pengamanan lokasi di Kawasan Pantai Boom sekitarnya, serta
- f. Promosi dan pemasaran Kawasan Pantai Boom.

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) huruf g bahwa salah satu kewajiban Pelindo III adalah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Kawasan Pantai Boom dan masyarakat sekitarnya di bidang pariwisata. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pasal 5 ayat (2) huruf e juga menunjukkan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, rencana pengembangan Kawasan Pantai Boom menjadi kawasan maritim unggulan Kabupaten Banyuwangi perlu didukung dengan pengelolaan di Kawasan Pantai Boom sesuai dengan perencanaan yang dibuat sehingga ada sinergitas program kegiatan antara kedua belah pihak (pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PT. Pelindo III) yang bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan. Sinergitas dalam pengelolaan kawasan Pantai Boom diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga membuahakan pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis memberikan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi bisa berjalan sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan pengelolaan Kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi agar berjalan sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Dari sudut pandang praktis, sebagai modal utama baik bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun Pelindo III untuk mengelola destinasi wisata guna menunjang pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Tidak hanya sejahtera, melainkan juga mandiri dan berakhlak.

2. Dari sudut pandang akademis, sebagai bahan masukan/saran kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun Pelindo III untuk mengelola Kawasan Pantai Boom Banyuwangi dengan berbasis *ecotourism* guna meningkatkan kunjungan wisatawan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Lokasi penelitian adalah kawasan Pantai Boom Banyuwangi yang terletak di Kelurahan Kampung Mandar, kecamatan Banyuwangi;
2. Implementasi kebijakan menggunakan teori model proses implementasi kebijakan (*a model of the policy implementation process*) Van Metter dan Van Horn meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi politik, sikap pelaksana, dengan *output* kinerja kebijakan;
3. Data yang dibutuhkan meliputi data potensi wilayah Pantai Boom dan layout kawasan Wisata Pantai Boom (tidak termasuk detail anggaran dan desain).

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan sikap perilaku. Kebijakan juga menjadi acuan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan. Sebagaimana Budiarto (dalam Imron 2002:8) menyampaikan bahwa “kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut”. Kebijakan merupakan ketentuan pokok yang disahkan secara hukum dan menjadi acuan suatu kelompok untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kenyataannya, sering diperdebatkan perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Ini terjadi, karena belum dipahaminya konsep kebijakan dan kebijaksanaan. Carl Friedrich (dalam Imron 2002:3) menyatakan bahwa:

Kebijaksanaan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijaksanaan merupakan tindakan atau sikap perilaku untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, secara garis besar dapat dipahami baik kebijakan maupun kebijaksanaan merupakan keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan maka kebijakan maupun kebijaksanaan harus dibuat dengan proses perencanaan yang matang. Dunn (1999:24) menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik divisualisasikan sebagai tahapan-tahapan yang saling bergantung dan harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, banyak masalah yang tak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama;

2. Formulasi kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif;

3. Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan;

4. Implementasi kebijakan:

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia;

5. Penilaian kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Tahapan kebijakan dilalui dan dilaksanakan sebagai bentuk mekanisme menjalankan suatu kebijakan. Banyaknya ide-ide kebijakan yang dirumuskan menjadi tidak berguna jika belum ada tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan sebelumnya. Kegagalan kebijakan bisa menjadi aktor utama banyaknya tujuan dan sasaran yang tidak bisa dicapai. Luankali (2007:219) mengatakan bahwa kegagalan kebijakan (*policy failure*) ada 2 (dua) kategori yaitu:

1. *Non implementation* (tidak terimplementasikan), suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana;
2. *Unsuccesfull implementation* (implementasi yang tak berhasil), suatu kebijakan dilaksanakan sudah sesuai rencana namun ada kendala kondisi eksternal yang tidak menguntungkan.

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya hanya konsep pemikiran yang dituangkan dalam sebuah coretan. Ketika rumusan kebijakan menjadi suatu acuan dalam menentukan sikap terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, maka baik kebijakan maupun kebijaksanaan menjadi sebuah ketentuan pokok yang harus diimplementasikan sebagai wujud kebijakan atau kebijaksanaan itu sendiri karena diharapkan nantinya para pembuat kebijakan bisa melihat ide-ide kebijakannya terlaksanakan di lapangan.

2.1.2 Teori Implementasi kebijakan

Salah satu tahapan pembuatan kebijakan yang penting adalah implementasi kebijakan. T. B. Smith (dalam Akib, 2010:3) mengakui bahwa, “ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan”. Jika kebijakan tersebut divisualisasikan maka terlihat jelas tujuan kebijakan, kesesuaian dengan perencanaan, perancangan, dan pembiayaan. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan penyelesaian masalah kebijakan. Van Metter dan Van Horn (dalam Yousa, 2007) menyampaikan bahwa:

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan yang dilakukan guna menyelesaikan masalah kebijakan tetap berdasar pada ketetapan yang telah dibuat sebelumnya yang berisikan program kegiatan kebijakan itu sendiri. Sebagaimana Grindle (dalam Akib, 2010:2) sampaikan bahwa:

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Kebijakan yang disusun dengan perencanaan yang telah matang sebelumnya menjadi acuan program kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan dan agar bisa mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Guna melihat keberhasilan suatu implementasi kebijakan mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, Nurharjadm (2008) menyampaikan beberapa model teori implementasi kebijakan yang sering digunakan antara lain:

1. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini beranggapan bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu 1) Karakteristik masalah, 2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, 3) Faktor-faktor di luar peraturan.

2. Model Van Horn dan Van Metter

Model ini merumuskan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan adalah; 1) standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, 2) tersedianya sumber daya, baik yang berupa dana, teknologi, sarana maupun prasarana lainnya, 3) komunikasi antara organisasi yang baik, 4) karakteristik birokrasi pelaksana, 5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik

3. Model Grindle (1980)

Model ini menyatakan implementasi ditentukan oleh isi (*content*) kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam hal ini, isi kebijakan mencakup: 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) Siapa pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu Konteks kebijakan meliputi: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, 3) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Model-model implementasi yang dijelaskan di atas merupakan pilihan tindakan penyelesaian masalah kebijakan. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Pertimbangan peneliti menggunakan model ini lebih kepada pelaksana kebijakan sebagai agen yang mengoperasikan program di lapangan yang memiliki peran paling penting dalam suatu implementasi kebijakan. Tindakan pelaksana kebijakan menjadi sangat menentukan arah kebijakan yang telah dibuat. Sebagaimana Van Metter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012:79) katakan bahwa:

Perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dengan menawarkan suatu pendekatan yang mencoba menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan prestasi kerja (*performance*).

Perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam suatu implementasi kebijakan menjadi lumrah karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan pendekatan lapangan yang dibutuhkan. Van Metter dan Van Horn (dalam Akib, 2010:8) juga menjelaskan bahwa:

Perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi maka dengan demikian proses implementasi akan dikatakan berhasil jika perubahan-perubahan yang dikehendaki relatif sedikit dan kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Perubahan yang dikehendaki dan kesepakatan terhadap tujuan kebijakan merupakan bentuk keberhasilan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn. Wahab (2012:79) menyampaikan bahwa keberhasilan model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn perlu didukung dengan elemen sebagai berikut:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan dibuat melalui perencanaan yang matang dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012:79) bahwa, “standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang akan hendak dicapai program atau kebijakan baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang”. Penentuan tujuan kebijakan harus dilakukan

dengan strategi yang tepat sehingga harapannya tujuan kebijakan bisa dicapai. Suryono (dalam Primadany, 2004:137) menyatakan bahwa:

Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan, sarana, dan cara.

Pemilihan strategi yang tepat guna mencapai suatu tujuan perlu didukung dengan kerjasama yang padu antara dua orang atau lebih. Sebagaimana Adnanputra (dalam Chatamallah, 2005:395) juga sampaikan bahwa, “strategi adalah bagian terpadu dalam suatu rencana, sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan, yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen”. Standar dan sasaran kebijakan bisa dicapai jika dilakukan pemilihan strategi yang tepat baik melalui perencanaan yang matang sehingga tujuan kebijakan bisa dicapai.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi penggerak dalam suatu implementasi kebijakan. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012:79) bahwa, “sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan”. Sumber daya adalah roda dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan. Setelah suatu kebijakan direncanakan secara matang dan telah ditetapkan, maka kebijakan perlu diimplementasikan. Salah satu sumber daya yang memiliki peranan penting adalah sumber daya manusia. Menurut Kathrin Connor yang dikutip oleh Schuller (1990), wakil presiden SDM di Liz Claiborne (dalam Ellitan, 2002:67) bahwa:

Human resources are a part of the strategic planning process. It is a part of policy development, line extension planning and the merger and acquisition processes. Little is done in planning policy on the finalization stages of any deal (Sumber daya manusia merupakan bagian dari proses perencanaan yang strategis. Sumber daya manusia merupakan bagian dari pembuatan kebijakan, proses perencanaan, penggabungan dan pengambilalihan. Sumber daya manusia memiliki kesepakatan dalam rangka penyelesaian akhir suatu kebijakan.

Sumber daya manusia sepakat dalam suatu kebijakan perlu adanya ketetapan guna menjalankan kebijakan yang sesuai. Sumber daya manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan sumber daya yang lain. Sebagaimana Handoko (dalam Ferinnadewi, 2004:16) sebutkan bahwa, “sumber keunggulan kompetitif yang paling sulit untuk ditiru dan lebih bertahan lama adalah sumber daya manusia melalui praktek-praktek sumber daya manusia”. Kelebihan ini sangat mendukung kebijakan bisa berjalan sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan. Hariandja (2007) mengatakan bahwa, “sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam suatu organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu, sendiri yang mengendalikannya. Keunggulan sumber daya manusia menjadi salah satu penggerak kebijakan bukan berarti elemen yang lain tidak diperhatikan. Sinergi antar sumber daya yang ada tetap menjadi hal yang penting dilaksanakan sehingga kebijakan bisa berjalan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang telah direncanakan sebelumnya.

c. Komunikasi antar badan pelaksana

Komunikasi antar pelaksana kebijakan menopang berjalannya suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012:79) bahwa, “komunikasi antar badan pelaksana menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan dan tujuan program”. Mekanisme yang dibuat harus sesuai dengan perencanaan dan ketersediaan sumber daya yang berkompeten dalam melaksanakan suatu kebijakan. Suatu kebijakan pengelolaan dalam hal ini kawasan Pantai Boom sebagai destinasi wisata perlu ditunjang dengan kolaborasi antar pelaksana agar sasaran kebijakan lebih tepat tercapainya. Kemitraan kerja dalam suatu implementasi kebijakan menjadi suatu keharusan agar kebijakan yang dijalankan nantinya sesuai dengan sasaran dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Menurut Linton (1995:8, dalam Ramadana dkk, 2013) bahwa:

Kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai

tujuan bisnis bersama. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

Kerjasama yang dilakukan secara tidak langsung terjadi hubungan bisnis baik orientasi keuntungan maupun orientasi prosedur. Hal tersebut lumrah terjadi dalam menjalin suatu kerjasama akan tetapi harus memperhatikan norma aturan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak yang bekerjasama.

Koridor kerjasama yang telah disepakati menjadi acuan masing masing pihak menjalankan hak dan kewajibannya. Hubungan antar organisasi membutuhkan kepercayaan antar pelaksana sehingga komunikasi bisa berjalan lancar dan implementasi kebijakan bisa dilaksanakan lintas sektor. Setiap lini memerlukan dukungan satu sama lain untuk membentuk suatu hubungan bukan ego sektoral. Untuk membentuk hubungan diperlukan penyambung antar lini yang perlu dicari dalam proses membentuk hubungan sehingga pemecahan masalah kebijakan bisa segera ditemukan dan diselesaikan bersama-sama.

d. Karakteristik badan pelaksana

Setiap lini organisasi yang bekerjasama harus sesuai dengan tugas masing-masing. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012:80) bahwa, “karakteristik badan pelaksana menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi”. Setiap organisasi harus memiliki sumber daya yang saling mendukung satu sama lainnya sehingga setiap pelaksanaan tugas tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Menurut Lupia & McCubbins (dalam Abdullah dan Halim, 2006) bahwa, “pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agent) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal”. Kepercayaan menjadi hal yang diperlukan ketika seorang pimpinan menunjuk orang atau sekelompok orang untuk menjalankan kebijakan di lapangan.

Struktur organisasi yang berkembang dan orang yang berada di struktur tersebut menjadi aktor dalam menjalankan perannya masing-masing guna

menjalankan kebijakan pimpinan. Stiglitz (1987) dan Pratt & Zeckhauser, 1985 (dalam Gilardi, 2001) juga menyampaikan bahwa:

Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak.

Hubungan internal agen pelaksana merupakan kerangka hubungan vertikal untuk menciptakan komitmen-komitmen kebijakan sehingga terjadi keseragaman dan pemahaman yang jelas. Dalam sebuah struktur organisasi juga terdapat nilai-nilai yang berkembang sebagai suatu wujud hubungan internal organisasi. Nilai-nilai yang berkembang tersebut menjadi suatu kepercayaan pimpinan terhadap agen yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakannya.

e. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Implementasi kebijakan tidak terlepas juga dukungan dari lingkungan sekitar kebijakan itu terjadi. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012:80) bahwa, “lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri”. Dukungan dari lingkungan bisa berarti keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan kebijakan yang dijalankan. Raharjana (2012) menyatakan bahwa, “partisipasi masyarakat hakikatnya bukan semata mendorong terjadinya proses penguatan kapasitas masyarakat lokal, tetapi merupakan sebuah mekanisme guna meningkatkan pemberdayaan bagi warga untuk terlibat dalam pembangunan secara bersama”. Hal ini mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam implementasi kebijakan. Jika bukan dalam bentuk tindakan, tetapi lebih kepada dukungan sikap dan perilaku dalam mensukseskan kebijakan. Suatu implementasi kebijakan memerlukan dukungan masyarakat. Masyarakat diberdayakan bukan diperdayai dengan janji-janji kosong. Pemberdayaan masyarakat bukan berarti mengorbankan kepentingan umum melainkan memberi peran kepada masyarakat setidaknya bisa merasakan dampak kebijakan tersebut.

f. Sikap pelaksana

Implementasi kebijakan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tetap tergantung pada sikap pelaksana kebijakan. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012:80) bahwa, “sikap pelaksana menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias, dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan”. Kemauan para pelaksana kebijakan bisa menentukan arah kebijakan yang dilaksanakan. Sebagaimana Robbins (2001:247) sampaikan bahwa:

Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Sikap perilaku individu menjadi salah satu komponen sinergi implementasi kebijakan.

Kemauan untuk berbuat demi kepentingan kebijakan yang didukung oleh masyarakat menjadi nilai tersendiri sebagai wujud perkembangan sikap individu. Herzberg yang dikutip Sudarwan (2010:110-111) menyampaikan bahwa, “ada faktor intrinsik (prestasi yang dicapai, pengakuan dunia kerja, tanggung jawab, dan kemajuan atau peningkatan) dan faktor ekstrinsik (hubungan personal antara atasan dan bawahan, teknik supervisi, kebijakan administratif, kondisi kerja, dan kehidupan pribadi) yang mempengaruhi seseorang dalam bekerja”. Maka motivasi seseorang untuk berbuat lebih apalagi untuk kepentingan masyarakat yang tertuang dalam suatu kebijakan akan menjadi dasar pijakan dalam implementasi kebijakan. Kemauan melaksanakan kebijakan sangat tergantung pada kemampuan diri sendiri untuk melaksanakan, memahami kebijakan yang telah ditetapkan serta tanggung jawab yang telah diberikan.

2.1.3 Pengelolaan Wilayah Pesisir

Secara umum, wilayah pesisir dan pulau kecil memiliki kekuatan yang besar karena potensi kelautan dan perikanannya. Dahuri *et al.* (dalam Huda, 2008) berpendapat bahwa:

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Pemanfaatan wilayah pesisir harus memperhatikan norma yang berlaku sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pengelolaan kawasan pesisir harus dilakukan secara berkelanjutan agar permasalahan lingkungan bisa diselesaikan dengan baik. Cicin-Sain dan Knecht (dalam Huda, 2008) juga menyampaikan bahwa, “pengelolaan terpadu adalah suatu proses dinamis dan kontinyu dalam membuat keputusan untuk pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan kawasan pesisir lautan beserta sumberdaya alamnya secara berkelanjutan”.

Pengelolaan wilayah pesisir merupakan pemanfaatan segala sumber daya yang ada pada kawasan pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak lingkungan kawasan pesisir. Pratikto (2006) menyampaikan dalam pemanfaatannya sangat perlu memperhatikan:

1. Kebijakan otonomi daerah;
2. Lonjakan permintaan persediaan makanan sebagai imbas dari meningkatkannya populasi manusia;
3. Perdagangan international;
4. Dinamika budaya masyarakat dunia;
5. Keterbatasan sumber dana dari pemerintah;
6. Hubungan sosial ekonomi antara masyarakat lokal (masyarakat pesisir) dengan sumber daya kelautan;
7. Peningkatan populasi manusia;
8. Kebijakan dan implementasi tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
9. Ekosistem pesisir yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan kawasan pesisir yang dilakukan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Perubahan yang diinginkan bisa saja belum dipenuhi segera. Adanya keterbatasan jangkauan wilayah, kerentanan sosial, serta

partisipasi baik pusat maupun daerah menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan kawasan pesisir. Untuk itu diperlukan sebuah pola pengelolaan yang baik agar fungsi wilayah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pratikto (2006) juga menyampaikan bahwa konsep pengelolaan secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan sumber daya pesisir perlu memperhatikan beberapa hal:

1. Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir harus mengintegrasikan para pengambil kebijakan dari sektor yang berbeda;
2. Proses pengelolaan sumber daya pesisir harus memiliki siklus tertentu Karena kondisi wilayah pesisir yang cenderung berubah-ubah terhadap waktu;
3. Dalam proses pengelolaannya juga harus didukung dengan evaluasi terhadap terhadap analisa keuntungan biaya, survey sumber daya dan dampak lingkungan.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor terkait. Kawasan Pantai Boom sebagai salah satu potensi maritim yang besar karena akan menjadi sebuah pelabuhan Marina Internasional, bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kapal pesiar yang bersandar dalam beberapa hari, membawa rombongan wisatawan baik lokal maupun mancanegara, melakukan aktivitas belanja di wilayah Banyuwangi, terjadilah perputaran ekonomi dalam masyarakat. Pengelolaan Kawasan Pantai Boom ini bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat khususnya sekitar kawasan Pantai Boom jika dikelola sesuai dengan norma aturan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

2.1.4 Pariwisata

Pada umumnya, pandangan masyarakat mengenai kepariwisataan berkaitan dengan orang-orang yang sedang mengunjungi tempat-tempat tertentu hanya untuk keperluan hiburan dan rekreasi. Namun, lebih dari itu pariwisata merupakan suatu fenomena kompleks yang memerlukan penetapan pemahaman yang jelas tentang wisata, wisatawan, pariwisata, daya tarik wisata, daerah tujuan pariwisata, usaha pariwisata serta industri pariwisata. Menurut Mualisin (dalam

Hepi dkk, 2015) bahwa, “pariwisata merupakan salah satu sektor industri terbesar dan menjadi sektor ekonomi yang tumbuh paling cepat di dunia”. Bermula dari hal tersebut, pemerintah daerah berlomba mengembangkan pariwisatanya melalui pola pengelolaan sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi objek wisata.

Pariwisata bisa menjadi motor penggerak sektor lain sehingga ikut berkembang sebagaimana Pendit (dalam Hepi dkk, 2015) sampaikan bahwa, “selain sebagai sektor industri terbesar, pariwisata dapat pula dijadikan sebagai pendorong berbagai sektor industri”. Pariwisata merupakan salah satu sektor industri terbesar dan menjadi salah satu elemen pendorong tumbuhnya sektor industri lainnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pembangunan pariwisata memperhatikan kondisi dan potensi wilayah. Unga (2011: 33-36) menyampaikan beberapa konsep wisata antara lain:

1. Konsep Wisata Alam terdiri dari:
 - a. Wisata Pantai (*marine tourism*), merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
 - b. Wisata Etnik (*etnik tourism*), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
 - c. Wisata Cagar Alam (*ecotourism*), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.

- d. Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
 - e. Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan di mana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman di sekitarnya.
2. Konsep Wisata Budaya terdiri dari:
 - a. Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti tempat bekas pertempuran (*battle fields*) yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.
 - b. Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, ataupun dengan tema khusus lainnya.
 3. Konsep Wisata Agama dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat religi seperti masjid, gereja, pura, kuil dan lain-lainnya serta kegiatan-kegiatan ritual keagamaan.
 4. Konsep Wisata Belanja dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat yang menjual souvenir dan buah tangan lainnya yang menjadi ciri khas dari tempat tersebut.
 5. Konsep Wisata Kuliner dilakukan dengan mengunjungi tempat makanan baik makanan ringan maupun makanan berat seperti soto, nasi dan lain-lain.

Konsep wisata yang digunakan memiliki keunikan sendiri sebagai daya tarik wisatawan untuk datang. Sutarso (2015:510) menyebutkan bahwa, “citra suatu daerah tujuan wisata dalam benak wisatawan akan memiliki pengaruh yang

besar terhadap kunjungan wisatawan di masa yang akan datang”. Citra yang dimiliki setiap tempat wisata merupakan nilai tambah wisata itu sendiri. Sebagaimana kawasan pantai Boom Banyuwangi yang memiliki khas alamnya bisa menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang ke Banyuwangi. Potensi wisata yang didukung oleh letak geografis yang strategis dengan pemandangan *sunrise* jarang dimiliki oleh pantai lainnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sektor inilah yang perlu diperhatikan agar pengelolaannya tidak merusak keindahan alamnya.

2.1.5 Pemerintah Daerah

Individu/kelompok manusia dalam masyarakat berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dalam berorganisasi. Organisasi tersebut dibentuk berdasarkan kebutuhan yang harus dilayani. Menurut Suradinata (2010:5) bahwa:

Organisasi terbesar dari suatu Negara adalah organisasi Negara itu sendiri yang terdiri dari organisasi Pemerintahan Negara, organisasi Pemerintahan Pusat, organisasi Pemerintahan Daerah, organisasi milik Pemerintah maupun swasta serta organisasi sosial lainnya.

Pemerintah menggunakan sistem pemerintahan untuk memenuhi pelayanan publik. Ndraha (dalam Supriatna, 2010:23) menyebutkan bahwa, “pemerintahan sebagai sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan akan barang, jasa pasar, jasa publik dan layanan *civil*”. Tuntutan yang diperintahkan berdasarkan posisinya sebagai *sovereign*. Pada dasarnya, proses-proses itu adalah proses produksi konsumsi. Kansil (2005:148) menyampaikan bahwa:

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah juga sangat berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan

pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Pemerintah daerah memiliki hak otonom untuk mengatur, mengurus daerahnya sendiri untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Suradinata (2010:145) menambahkan bahwa dalam paradigma pembangunan daerah, diperlukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan sebagai kemajuan historis;
- b. Pembangunan sebagai eksploitasi yang berencana dari sumber-sumber kekayaan alam;
- c. Pembangunan sebagai promosi ekonomi yang terencana, kemajuan sosial dan politik;
- d. Pembangunan sebagai suatu kondisi yang diharapkan;
- e. Pembangunan sebagai suatu proses sistem;
- f. Pembangunan sebagai suatu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- g. Pembangunan sebagai perubahan struktur yang berencana; dan
- h. Pembangunan sebagai modernisasi.

Kecenderungan pariwisata dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan salah satunya perubahan struktur sosial ekonomi beberapa Negara di dunia sehingga menjadikan pariwisata menjadi bisnis dan promosi ke dunia internasional. Wisatawan yang datang serta merta mengingat setiap hal yang ditemuinya. Maka, pariwisata menjadi primadona di beberapa Negara di dunia tak terkecuali di Indonesia. Kansil (2005:149) juga mengatakan bahwa prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab yang dimiliki pemerintah daerah antara lain:

1. Lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah negara;
2. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahannya yang telah diberikan;
3. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
4. Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
5. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.

Pariwisata menjadi salah satu bentuk perkembangan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Syauckani dalam Zuhro (2010:11) juga menambahkan bahwa pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi pada daerah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, diantaranya:

1. Realisasi dari proses efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
2. Memberikan pendidikan politik pada pemda dan masyarakat di daerah;
3. Menjaga stabilitas politik;
4. Kesetaraan politik antar pemerintah daerah; serta
5. Pelaksanaan akuntabilitas publik.

Pariwisata juga menjadi salah satu realisasi dari proses penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tren dewasa ini. Sumihardjo (2008:71) mengatakan bahwa, “penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah ketika suatu pemerintahan dapat dengan cepat dan tepat mencapai sasaran yang hendak dicapai”. Sejalan dengan pendapat Sumihardjo, Rasyid (dalam Supriatna, 2010:23) mengatakan bahwa, “pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat bukan melayani dirinya sendiri, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama”. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang tepat sasaran salah satunya dengan pembangunan pariwisata. Kawasan pantai Boom Banyuwangi diproyeksikan akan menjadi pelabuhan Marina bertaraf *international* yang bisa menampung kapal pesiar. Proyek besar tersebut harus dikelola dengan baik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya sekitar kawasan Pantai Boom.

2.2 Landasan Normatif

2.2.1 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pesisir dan pulau pulau kecil merupakan dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang

perubahan tentang Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 1 Ayat (2), disebutkan bahwa “Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3), “Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya”.

Maka perlunya kemitraan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 6 bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan salah satunya antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan salah satunya untuk pariwisata. Hal ini diperjelas dalam Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 18 ayat (1) bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.

2.2.2 Pariwisata

Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 30 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. Dalam pasal 6 disebutkan juga bahwa “Pembangunan kepariwisataan ... diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata”. Selanjutnya pasal 7 menyebutkan pembamngunan pariwita meliputi:

- a. Industri pariwisata,
- b. Destinasi pariwisata,
- c. Pemasaran, dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 12 juga menyebutkan bahwa “salah satu aspek dalam penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata”.Selanjutnya dalam pasal 23 ayat 1 huruf (c) disebutkan bahwa “kewajiban pemerintah daerah adalah memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali”.

2.2.3 Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 18 ayat (3) bahwa kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. Pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang;
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya merupakan studi yang memiliki fokus yang berbeda dengan kajian penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Perbedaan tersebut menjadi gambaran buat peneliti untuk mengambil fokus

penelitian dari sudut pandang lain. Adapun beberapa penelitian di bawah ini menjadi relevansi bagi peneliti untuk melakukan penelitian lainnya.

- a. Naruddin Dalimunthe (2007). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai". Medan: Universitas Sumatra Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi pantai cermin dan mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam pengembangan potensi pantai cermin. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan analisis data berupa wawancara mendalam (*indepthinterview*) menggunakan alat penelitian verbal (*tape recording*). Hasil penelitian memperlihatkan kepedulian masyarakat untuk menjaga dan terlibat dalam usaha jasa pariwisata, pantai cermin merupakan aset yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah kawasan wisata dan Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai Sebagai Kawasan *Eco Marine Tourism*.

Penelitian tersebut di atas menunjuk pada kepedulian masyarakat dalam membangun suatu kawasan wisata. Potensi wisata yang ada dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. Relevansi dengan penelitian yang peneliti buat yakni pengelolaan kawasan Pantai Boom Banyuwangi tidak bisa berkembang jika masyarakat tidak ikut berperan serta menjaga kawasan Pantai Boom Banyuwangi.

- b. Kartini La Ode Unga (2011). "Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda". Makassar: Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor internal yang mendukung dan menghambat pengembangan pariwisata Kepulauan Banda, Menentukan faktor-faktor eksternal yang mendukung dan menghambat pengembangan pariwisata Kepulauan Banda serta Menentukan strategi pengembangan kawasan wisata Kepulauan Banda. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan dengan lebih baik sifat-sifat yang diketahui keberadaannya serta relevan dengan variable-variabel yang diteliti. Pendekatan

dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menggambarkan tanggapan responden terhadap obyek berdasarkan kuesioner yang diberikan. Hasil penelitian memperlihatkan faktor-faktor internal yang mendukung pengembangan pariwisata Kepulauan Banda adalah keragaman atraksi, *image* kawasan yang sudah terkenal sejak VOC, sifat keterbukaan, keamanan, dan kemudahan mencapai lokasi. Sementara yang menghambat adalah belum adanya pusat informasi wisata, sifat terhadap lingkungan yang sangat rendah, SDM bidang pariwisata masih rendah, dan belum memadainya infrastruktur pendukung. Faktor-faktor eksternal yang mendukung pengembangan pariwisata Kepulauan Banda adalah aksesibilitas, perkembangan teknologi dan informasi, regulasi, serta tingginya potensi dan minat wisatawan. Sementara yang menghambat adalah interusi budaya dan pengrusakan lingkungan. Strategi prioritas berdasarkan SWOT adalah pengembangan wisata *diving* dan *snorkeling*, membangun jaringan dengan wisata lain, bekerjasama dengan agen perjalanan, dan membuat website khusus.

Penelitian tersebut di atas menunjuk pada pemilihan strategi dalam pengembangan wisata kepulauan. Wisata kepulauan memerlukan perencanaan yang strategis untuk menopang pengembangan wisata itu sendiri. Relevansi dengan penelitian yang peneliti buat yakni pengelolaan kawasan pantai Boom Banyuwangi memerlukan pemilihan strategi yang tepat sehingga implementasinya bisa terlaksana sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Usman (2003:42) mendefinisikan metode sebagai suatu prosedur/cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis sedangkan metode penelitian itu sendiri diartikan sebagai pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Prosedur penelitian perlu dipahami agar penelitian yang dilakukan terarah. Fenomena yang terjadi di lapangan perlu diamati sehingga data-data yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai penelitian yang diharapkan, salah satu metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sebagaimana Moleong (2004:3) sampaikan bahwa, “metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Prosedur penelitian yang dilakukan dengan mencari informasi dari orang maupun perilaku seseorang dapat menjadi sumber data penelitian.

Metode kualitatif juga digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan yang dijelaskan dengan kata-kata dan bahasa yang menarik sehingga lebih mudah dipahami. Sebagaimana Moleong (2007:6) pernah nyatakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pertimbangan lainnya, peneliti menggunakan metode kualitatif ini karena ketika di lapangan ada kendala seperti topik yang diangkat dalam suatu permasalahan penelitian ternyata mengalami titik jenuh, bisa menyesuaikan dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Moleong (2004:138) mengatakan bahwa:

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda;
- b. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan;
- c. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Peran peneliti sebagai instrumen penelitian menjadi penting karena arah penelitian ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Metode kualitatif merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Nasution (dalam Sugiyono, 2009:61) menjelaskan bahwa:

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian ini. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu – satunya yang dapat mencapainya.

Peneliti sebagai alat pencari data perlu memahami topik yang akan diteliti. Setiap langkah penelitian perlu dipahami agar penelitian tetap pada topik yang akan diteliti nantinya. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi sebagai alat menemukan fakta yang terjadi. Data yang dikumpulkan peneliti di lapangan selama penelitian dilaksanakan merupakan kenyataan yang ada. Sebagaimana Sugiyono (2012:7) sampaikan mengenai pemahaman metode penelitian kualitatif bahwa:

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru. Karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolat), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Peneliti juga menggunakan metode kualitatif dalam penelitian dengan tetap melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Teori digunakan untuk menentukan keteraturan data yang dikumpulkan. Sebagaimana Sugiyono (2008:23-24) katakan bahwa:

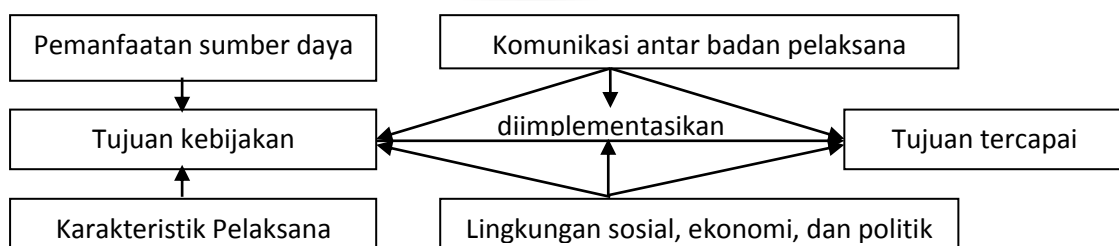
1. Masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau masih gelap;
2. Untuk memahami makna di balik data yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang.

Penelitian ini mengarah pada implementasi kebijakan yang merupakan salah satu langkah kebijakan yang memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah kebijakan. Sebagaimana Edward III (dalam Akib, 2010:2) sampaikan bahwa, “implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan”. Implementasi kebijakan dipandang menjadi elemen yang perlu dipersiapkan dengan baik melalui prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut juga didukung oleh Van Metter dan Van Horn (dalam Akib, 2010:2) bahwa, “tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”. Tindakan yang dilakukan berdasar pada prosedur pelaksanaan sehingga sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya bisa dicapai.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan proses kolektif tersebut tercermin pada operasionalisasi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Gambar 3.1
Operasionalisasi faktor implementasi kebijakan



Sumber: peneliti, diolah, 2016

Standar dan sasaran kebijakan merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan untuk mengoperasikan program di lapangan. Pelaksanaannya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya dan karakteristik pelaksana yang sesuai dengan kebijakan yang diimplementasikan. Elemen yang ada kemudian dikomunikasikan dengan badan pelaksana yang terkait lainnya sehingga lebih pencapaian tujuan lebih tepat sasaran. Beberapa pelaksana kebijakan melakukan langkah kerjasama untuk mencapai tujuan dan sarasanya yang ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana Pamungkas (2013) katakan bahwa:

Kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saing [*sic!*] membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas [*sic!*] di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Kedua belah pihak melaksanakan kerjasama dengan prinsip saling membutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan sehingga tidak ada pemaksaan kesepakatan massal yang berdampak pada melencengnya implementasi kebijakan dari tujuan awal yang telah disepakati bersama.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kawasan Pantai Boom yang berada di Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan Pantai Boom untuk mendongkrak kunjungan wisatawan guna menopang sektor pariwisata. Salah satunya Boom Marina Banyuwangi oleh Pelindo III.
2. Pengelolaan kawasan pantai Boom ini dilaksanakan oleh dua agen pemerintah yakni Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pelindo III melalui perjanjian kerjasama yang dibuat.
3. Kawasan pantai Boom memiliki lokasi yang strategis sehingga diharapkan bisa menjadi pintu gerbang wisata wilayah Timur Indonesia.

Waktu penelitian dilakukan rentang bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 dengan ruang lingkup kerjasama antara lain, pengelolaan tiket

masuk, pengelolaan jasa parkir kendaraan, pengelolaan untuk kegiatan usaha kecil di Kawasan Pantai Boom, pemeliharaan kebersihan dan pertamanan di Kawasan Pantai Boom sekitarnya, pemeliharaan dan pengamanan lokasi di Kawasan Pantai Boom sekitarnya, serta promosi dan pemasaran Kawasan Pantai Boom.

Beberapa ruang lingkup kerjasama yang ada, peneliti batasi pada ruang lingkup kerjasama yakni promosi dan pemasaran Kawasan Pantai Boom dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sasaran kebijakan adalah meningkatkan kunjungan wisatawan serta perekonomian masyarakat Banyuwangi. Hal ini menjadikan promosi dan pemasaran menjadi hal utama yang perlu dilakukan dengan segera karena kawasan Pantai Boom menjadi salah satu produk wisata yang dipamerkan.
2. Munculnya *trending tourism* dengan konsep *ecotourism* yaitu pariwisata unggul yang menonjolkan pelayanan berkualitas dengan menjaga kealamian objek wisata. Pantai Boom adalah salah satunya karena letak strategis dan kondisi alamnya sebagai tempat terbitnya mentari pertama di Pulau Jawa sehingga menjadi ikon wisata yang lengkap dibandingkan daerah lainnya.
3. Promosi dan pemasaran sangat menentukan karena para pelaksana kebijakan dituntut ikut mempromosikan wisata. Potensi kawasan Pantai Boom sebagai ikon dan destinasi baru merupakan salah satu inovasi Kabupaten Banyuwangi.

3.3 Penentuan Informan

Informan menjadi sumber data yang penting guna memahami fenomena yang terjadi di lapangan ketika kebijakan berlangsung. Menurut Harsono (dikutip oleh Talumewo, 2014) bahwa, “dalam penelitian kualitatif, populasi dan sampel dalam penelitian yang diambil adalah disebut informan”. Informan penelitian adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan informan yang benar-benar terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pengelolaan Kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi.

Sebagaimana Afrizal (2014:139) sampaikan bahwa, “informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam”. Peneliti memerlukan wawancara secara mendalam guna memperoleh informasi yang benar-benar *valid*. Peneliti harus memilah informan yang layak dan memiliki potensi dalam topik penelitian yang diangkat oleh peneliti. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini, peneliti batasi pada ruang lingkup kerjasama promosi dan pemasaran kawasan pantai Boom dengan pertimbangan sebagaimana peneliti sebutkan sebelumnya.

Menurut Hendarso (dalam Suyanto, 2005) yang dikutip oleh Oktavia dkk, menyatakan bahwa informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informant*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian;
2. Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti;
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Informan diperoleh sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Informan ditentukan lebih awal agar penelitian tidak menjadi panjang lebar sehingga sesuai dengan topik permasalahan penelitian. Afrizal (2014:140) membagi mekanisme penentuan informan menjadi dua yaitu:

1. Mekanisme disengaja atau *purposive* yaitu peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.
2. Mekanisme gelinding bola atau *snowballing* yaitu informan yang dipilih merupakan hasil rekomendasi dari informan sebelumnya. Ini umumnya digunakan bila peneliti tidak mengetahui dengan pasti orang-orang yang layak untuk menjadi sumber.

Peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara *purposive* karena informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan

memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Penentuan informan secara *purposive* oleh peneliti bukan ditentukan secara sepihak tetapi sebagai pertimbangan peneliti sebagaimana Lincoln dan Guba (dalam Sugiyono, 2009:54) sampaikan bahwa ciri – ciri khusus penentuan informan secara *purposive* adalah sebagai berikut:

1. *Emergent sampling design*/sementara;
2. *Serial selection of sample unit*/menggelinding seperti bola salju;
3. *Continuous adjustment or “focusing” of the sample*/disesuaikan dengan kebutuhan;
4. *Selection to the point of redundancy*/dipilih sampai jenuh.

Selanjutnya, peneliti menentukan informan dalam penelitian ini sesuai kriteria yang ditentukan dengan tugas pokok fungsi informan yang peneliti pilih yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Informan Kunci:

1. Informan merupakan pembuat kebijakan yang memahami seluk beluk kebijakan yang dibuatnya;
2. Informan juga merupakan pelaksana kebijakan yang memahami teknis pelaksanaan kebijakan di lapangan;
3. Informan merupakan pimpinan instansi atau minimal yang membidangi kebijakan.

b. Informan Tambahan:

1. Informan merupakan warga masyarakat asli yang berada di sekitar lingkungan Pantai Boom Banyuwangi;
2. Informan merupakan salah satu pengunjung kawasan Pantai Boom Banyuwangi;
3. Informan merupakan warga masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi di sekitar Pantai Boom Banyuwangi.

Menunjuk pada penjabaran tugas pokok dan fungsi informan di atas, peneliti menentukan informan dalam penelitian yakni sebagai berikut:

a. Informan kunci:

1. Bapak H. Abdullah Azwar Anas, M.Si, Bupati Banyuwangi;

2. Bapak Toto Hariyanto, Direktur Sumber Daya Umum PT. Pelindo III (persero);
 3. Bapak Mohamad Yanuarto Bramuda, S.Sos, MBA, MM, Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Informan Tambahan :
1. Bapak Bambang, Lurah Kampung Mandar;
 2. Bapak Slamet, Penjaga Pantai Boom (57);
 3. Bapak Suyadi, Nelayan Pantai Boom (46);
 4. Ibu Wiwin, Pengunjung Pantai Boom (41);
 5. Ibu Asih, PKL Pantai Boom (52).

3.4 Pengumpulan Data

Usman (2003:54) menyampaikan bahwa, “pengumpulan data dapat diklasifikasikan menurut *setting*, sumber dan cara/teknik”. Ditinjau dari *setting* terbagi atas natural *setting* dan non natural *setting*, dilihat dari sumbernya berupa sumber primer dan sekunder serta jika diperhatikan cara/tekniknya terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), angket (*quesioner*) dan dokumentasi (*documentation*). Sedangkan, Sugiyono (2012) menyatakan bahwa, “dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural *setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dokumentasi serta triangulasi”. Peneliti mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat penelitian ini dilakukan. Peneliti membagi sumber data penelitian ini menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Tamodia (2013:26) menjelaskan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Peneliti mengumpulkan data penelitian ini melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta triangulasi.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Peneliti juga mengumpulkan data yang sudah ada dari beberapa instansi pemerintah terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Dishubkominfo Kabupaten Banyuwangi, PT. Pelindo III (persero) cabang Tanjung Wangi, serta Kelurahan Kampung Mandar.

Peneliti mengumpulkan data-data tersebut menggunakan alat atau *instrument* sebagaimana Arikunto (2006:149 dikutip oleh Oktavia dkk), sampaikan yakni instrumen penelitian atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Panca indera untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi;
2. Perangkat penunjang yakni meliputi: alat perekam suara untuk melakukan wawancara dengan informan, alat-alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan informan, dan kamera yang digunakan untuk mengambil gambar pada saat observasi.
3. Pedoman wawancara atau *interview guide* yakni berupa panduan pertanyaan terbuka yang digunakan penulis untuk melakukan wawancara dengan informan.

Pengumpulan data penelitian sebagaimana peneliti sampaikan di atas memerlukan teknik agar data yang diinginkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2012:226) bahwa, “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. Fakta penelitian diperoleh peneliti melalui observasi lapangan. Sebagaimana Tamodia (2013:26) sebutkan bahwa, “observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap pokok permasalahan yang dihadapi”. Pengamatan observasi ini dilakukan dengan tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain seperti proses kerjanya. Peneliti mencari fakta lapangan secara cermat untuk mengurangi data yang tidak relevan dengan penelitian.

Cartwright (dalam Herdiansyah, 2010) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Peneliti melakukan observasi mengenai perilaku masyarakat di sekitar Pantai Boom Banyuwangi selama penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta mengunjungi lokasi penelitian.

b. Wawancara

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan relevan dengan penelitian. Moleong (dalam Wariyah, 2014:62) mengungkapkan bahwa, “wawancara merupakan percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu”. Tujuan yang dimaksud adalah informasi yang relevan dengan topik penelitian.

Sebagaimana Esterberg dalam Sugiyono (2012:231) mendefinisikan wawancara yakni “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* (Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu)”. Wawancara yang dilakukan dengan saling bertanya jawab untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna mendukung penelitian.

Makna topik penelitian dapat dicapai jika wawancara yang dilakukan lebih mendalam. Sugiyono (2011:160) menyebutnya *Indepthinterview* yakni, “wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya melainkan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan”. Peneliti memilih *indepthinterview* karena ingin mendapatkan informasi rinci mengenai implementasi pengelolaan kawasan pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat menentukan secara pasti permasalahan yang harus diteliti serta diperoleh data yang akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sangat menunjang penelitian sebagai dokumen pendukung untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Tamodia (2013:27) menyebutkan bahwa, “dokumentasi adalah teknik yang berupa informasi dan berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan”. Dokumentasi memiliki peranan dalam penelitian karena merupakan bukti otentik topik penelitian.

Sugiyono (2012:240), mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen yaitu, “catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Peneliti menyampaikan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 dan Surat Keputusan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT. Pelindo III (persero) serta dokumentasi lainnya berupa foto-foto pada saat kegiatan baik pra dan pasca perjanjian kerja sama (PKS) dan foto perkembangan fisik dan prasarana yang telah ada.

d. Triangulasi

Peneliti juga memerlukan teknik pengumpulan data untuk mengecek kredibilitas data yang sudah dikumpulkan. Sugiyono (2012:241) menyebutnya triangulasi yakni, “sebuah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Kredibilitas data yang dimaksud adalah keabsahan data yang telah dikumpulkan sehingga penelitian yang dilakukan benar benar sah. Peneliti menyatakan bahwa teknik triangulasi dilakukan bukan semata-mata mencari kebenaran dari suatu

permasalahan melainkan lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap hal yang ditemukan selama penelitian dilakukan.

Wiliam Wiersma (yang dikutip oleh Bachri, 2010:55) menyebutkan bahwa triangulasi dalam bentuk pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam beberapa macam, yakni:

- a. Triangulasi Sumber, yakni membandingkan dan mengecek ulang informasi yang diperoleh dengan menggunakan sumber yang berbeda;
- b. Triangulasi Waktu, yakni mengamati perubahan suatu proses dan perilaku manusia karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu;
- c. Triangulasi Teori, yakni memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu;
- d. Triangulasi Peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara karena peneliti mempunyai sikap dan gaya yang berbeda-beda.

Peneliti melakukan pengumpulan data sekaligus mengecek keabsahan data dengan mengonfirmasi kebijakan pengelolaan kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi kepada masyarakat sebagai penikmat langsung kebijakan terutama masyarakat sekitar kawasan Pantai Boom Banyuwangi. Informan yang peneliti tentukan merupakan pelaksana kebijakan yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan metode triangulasi sumber baik wawancara mendalam maupun observasi agar memahami hal-hal yang peneliti temukan di lapangan.

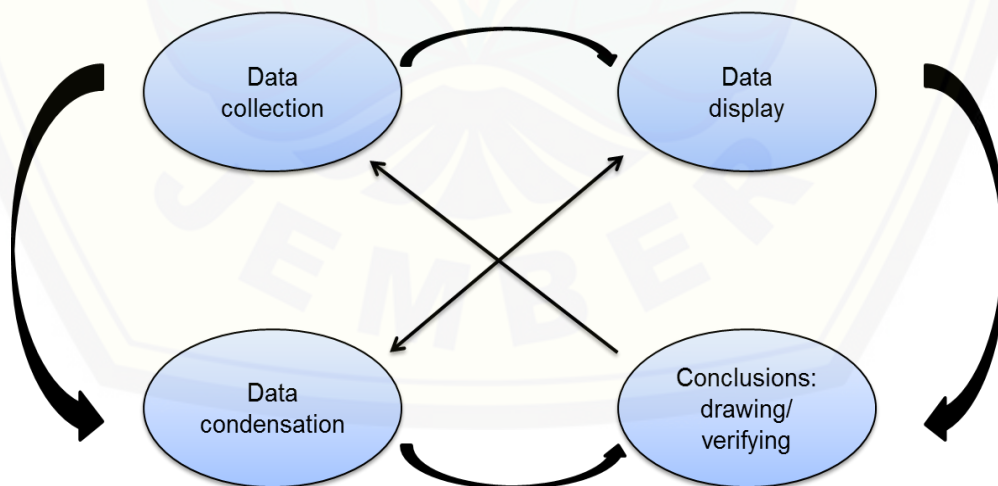
Sumber data relevan lainnya yang peneliti gunakan sebagai uji keabsahan data dengan metode triangulasi sumber berupa observasi oleh peneliti selama terjun di lapangan, hasil wawancara dengan kelompok/orang yang berada di luar kebijakan seperti pengunjung atau orang yang tidak dilibatkan dalam kebijakan ini secara penuh, dokumen resmi lain yang terkait pengelolaan kawasan Pantai Boom Banyuwangi, yang juga digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

3.5 Analisa Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2009:88) menyebutkan bahwa, “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Miles and Huberman (dalam Lestari, 2014) menyebutkan bahwa, “analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penelaahan, pengurutan, pengelompokan data dengan tujuan menyusun hipotesis kerja dan mengangkat teori hasil penelitian”. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mengumpulkan data, dikelompokkan, disajikan kemudian ditarik kesimpulan sehingga memberikan makna yang bermanfaat bagi masalah-masalah penelitian.

Langkah-langkah analisis data penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) Miles dan Huberman yang telah dikembangkan oleh Saldana (dalam Said, 2015) memiliki tiga komponen utama antara lain kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Gambar 3.2 Model Analisis Interaktif Miles and Huberman, Johnny Saldana, 2013



Sumber: Said, 2015

Sebagaimana gambar 3.2 Nasir (2016) menjelaskan komponen tersebut sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*data condensation*)

Merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Kondensasi data yang dipersiapkan dapat ditemukan pada kerangka konseptual, pada kasus-kasus, pada pertanyaan penelitian, dan pada pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Kondensasi data adalah sebuah pola analisis yang dipertajam, diklasifikasikan, difokuskan, dibuang, dan pengorganisasian data dalam hal yang menjadikan konklusi akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

Data mengenai kebijakan pengelolaan kawasan Pantai Boom Banyuwangi yang dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti sebagai data penelitian, dipilah-pilah dan disusun sesuai dengan topik penelitian. Data yang tidak digunakan tidak disingkirkan melainkan digunakan sebagai salah satu temuan selama peneliti di lapangan. Pengumpulan data kebijakan pengelolaan kawasan Pantai Boom Banyuwangi yang dilakukan oleh peneliti sampai mencapai batas tidak ditemukan data yang relevan lagi di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Pola frekuensi yang paling sering untuk data kualitatif di masa lalu telah memperluas teks. Dengan menggunakan teks yang luas menjadikan peneliti kemungkinan menemukan kemudahan untuk melompat menuju ketergesaan, parsialitas, dan tidak menemukan kesimpulan. Penyajian meliputi banyak tipe dari matriks, grafik, kurva, dan jaringan yang kesemuanya dirancang untuk menyatukan berbagai informasi yang terorganisir menjadi dapat diterima dalam pola lengkap sehingga analis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan juga menggambarkan kesimpulan yang merata atau beralih pada langkah berikutnya dari analisis di mana penyajian disarankan akan berguna.

Peneliti merekap data kebijakan pengelolaan kawasan pantai Boom Banyuwangi yang telah dikumpulkan selama penelitian untuk diolah menjadi data yang mudah dipahami dan sederhana dalam penyajiannya. Data lebih terorganisir sehingga bisa memahami topik penelitian yang disajikan. Data ini digunakan untuk menemukan inti permasalahan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan kawasan pantai Boom Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi yang lebih akurat sehingga kesimpulan penelitian bisa lebih tepat sasaran dan tujuan yang diharapkan.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Alur ketiga dari aktivitas analisis adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan, alur kausal, dan proposisi. Kesimpulan akhir tidak akan datang hingga pengumpulan data berakhir, tergantung pada ukuran catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencaharian yang digunakan, daya tarik peneliti, dan batas-batas lain yang dapat ditemukan.

Verifikasi dapat menjadi penentu sebagaimana lintasan kedua dari pikiran melalui tulisan, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan atau tidak dicari dan digabungkan dengan argumentasi pendek dan *review* dari kolega untuk membangun "*consensus intersubjektif*" atau dengan hasil baik untuk menampilkan bentuk lain dari penemuan dalam data. Arti pentingnya data dapat diuji alasan atau kepercayaannya, kekuatannya, *confirmability*- validitasnya.

Peneliti pada tahapan ini memverifikasi data yang telah dibuat sebelumnya untuk disusun dalam penelitian. Penempatan data disesuaikan dengan materi yang dibahas dalam penelitian. data yang digunakan relevan dengan materi penelitian sehingga nantinya bisa ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan masalah penelitian.

3.6 Validitas/Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, maka dilakukan uji validitas data. Sugiyono (dalam Bachri, 2010) menyampaikan bahwa terdapat dua macam validitas penelitian kualitatif yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Uji validitas data penting dilakukan agar penelitian yang dibuat bukan rekayasa melainkan kondisi nyata di lapangan. Beberapa teknik uji validitas data sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (dalam Alberto, 2014:3) bahwa:

Dalam proses analisis data, memeriksa keabsahan data, melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substansif diperlukan teknik pemeriksaan yaitu derajat kepercayaan, keterlibatan, ketergantungan, dan kepastian.

Afrizal (2014:168) juga mengatakan bahwa, “salah satu teknik untuk memperoleh data yang *valid* dalam penelitian kualitatif adalah penggunaan teknik triangulasi”. Teknik ini digunakan untuk memperkuat data, dan membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.

Dalam penelitian ini, sebelum penarikan kesimpulan, peneliti melakukan uji validitas data penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi;
2. peneliti melakukan pengecekan data dengan menggunakan triangulasi dengan berbagai pendekatan antara lain;
 - a. Membandingkan informasi dari informan kunci dengan informan tambahan untuk menemukan kecocokan informasi.
 - b. Melakukan observasi di lapangan dengan jangka waktu tertentu untuk menemukan adanya perubahan sikap dan perilaku masyarakat.
3. Uji validitas data dilakukan sampai dengan tidak ditemukan lagi data yang tidak relevan bagi penelitian.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, hasil penelitian dan pembahasannya, analisa peneliti beberapa aspek dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi belum bisa dikatakan berjalan baik yakni *pertama*, pencapaian standar dan sasaran kebijakan menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan di kawasan Pantai Boom sudah mengalami peningkatan, sumber daya dimiliki oleh para *stakeholder* sudah mengarah kepada peningkatan kemampuan melalui penyelenggaraan pelatihan, karakteristik pelaksana menunjukkan bahwa para *stakeholder* memiliki cara untuk mencapai tujuan melalui penyelenggaraan *event*. Namun, komunikasi antar pelaksana kebijakan masih belum dilaksanakan dengan baik. Perbedaan visi dan misi masing-masing *stakeholder* terlihat jelas sehingga terjadi perbedaan cara pandang. Sikap pelaksana juga masih menunjukkan adanya ego sektoral.

Kedua, pada dasarnya dari segi sosial, pengelolaan kawasan pantai Boom secara langsung terjadi interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal yakni pada saat transaksi wisata, segi ekonomi yakni berkah ekonomi yang didapatkan karena penyelenggaraan *event*. Segi politik, pengelolaan kawasan pantai Boom merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Banyuwangi karena keunikan alamnya dan lokasinya yang strategis. Namun, dukungan budaya masyarakat sekitar kawasan Pantai Boom perlu diperhatikan. Masyarakat kawasan pantai Boom menggantungkan kehidupan mereka sebagai nelayan tradisional. Dikhawatirkan konsep *ecotourism* yang dicanangkan merusak habitat dan alam sekitar kawasan pantai Boom.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan kawasan Pantai Boom di Kabupaten Banyuwangi belum berjalan sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan karena aspek komunikasi yang dilaksanakan masih mengutamakan kepentingan sektoral daripada kepentingan bersama. Ego sektoral bisa dihindari jika para pelaksana kebijakan memiliki keinginan untuk

mencapai tujuan bersama. Nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat perlu menjadi pertimbangan lagi bagi para pelaksana kebijakan di lapangan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pelindo III harus segera melaksanakan FDG (*Forum Discussion Group*) untuk mengatur teknis pengelolaan kawasan Pantai Boom.
2. Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pelindo III selaku pengelola kawasan Pantai Boom harus memperhatikan kondisi budaya masyarakat dengan memberikan jaminan kearifan lokal.
3. Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pelindo III selaku pengelola kawasan Pantai Boom memberikan insentif bagi karyawan/pegawai dan memberikan pertimbangan merekrut petugas pengelola kawasan Pantai Boom yang berasal dari masyarakat lingkungan sekitar pantai Boom.
4. Melakukan sidak untuk memantau tata kelola kawasan Pantai Boom yang bisa menjadi acuan pengambilan keputusan ke depannya nanti.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dunn, N. Willam. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua) Dalam Muhadjir Darwin (Penyunting)*. Jogjakarta. Gadjah Mada Univeristy Press.
- Hariandja, Marihot Tua Effendi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Cetakan ke-4. Jakarta: Grasindo
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Kansil, C.S.T. Dan Christine C.S.T Kansil. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Luankali, Bernandus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta.
- Solichin, Abdul Wahab. 2012. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah: Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan Keempat Belas. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.

- Sumihardjo, Tumar. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah: Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan*. Bandung: Fokusmedia
- Supriatna, Tjahya Dan Arjono Sukiasa. 2010. *Manajemen Kepemimpinan Dan Sumber Daya Aparatur*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Suradinata, Ermaya, 2010. *Leadership: How to Build a Nation Reformasi Organisasi Dan Administrasi Pemerintahan*. Bandung: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Usman, Husaini dkk. 2003. *Metodologi Penulisan Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yoeti, Oka A. 2006. *Pariwisata Budaya Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yousa, Amri. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Bandung: LP3AN.
- Zuhro, R. Siti dkk. 2010. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah Dan Solusinya*. Jogjakarta: The Habibie Center.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Dalimunthe, Naruddin. 2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- La Ode Unga, Kartini. 2011. *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Jurnal/Majalah/Artikel Ilmiah:

- Akib, Haedar. 2010. *Jurnal Administrasi Publik: Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Vol. 1. No. 1. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Alberto, dkk. 2014. *JISIP: Peran Kepemimpinan dalam Memotivasi Kinerja Pegawai*. ISSN 2442-6962. Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Ardiana, L.D.K.R., Dkk. 2010. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya terhadap Kinerja UKM di Surabaya*. Vol. 12 No. 1. Maret 2010. Surabaya: UNTAG Surabaya
- Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

- Chatamallah, Maman. 2005. Strategi “Public Relations” dalam promosi pariwisata: studi kasus dengan pendekatan “Marketing Public Relations” di Provinsi Banten. Dikti.
- Djati. S. Pantja dan M. Khusaini. 2003. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Kajian terhadap Kepuasan Kompensasi, Komitmen Organisasi, dan Prestasi Kerja*. Vol. 5 No. 1. Maret. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Duwit. Filliks. 2015. *Jurnal EMBA: Pengaruh Kompetensi Komunikasi, Kecerdasan Emosional, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai*. Vol. 3 No. 4. Desember. ISSN 2303-1174. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Ellitan, Lena. 2002. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Praktik-praktik Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan*. Vol. 4 No. 2. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan: Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Vol. 2 No. 1.
- Heridiansyah. Jefri dan Dwi Prawani. 2015. *Jurnal STIE Semarang: Optimalisasi Fungsi SDM sebagai Upaya Menciptakan Keunggulan Kompetitif*. Vol. 7 No. 3. Edisi Oktober. ISSN 2252-826. Semarang. STIE.
- Hepi, Irma Meriatul, dkk. 2015. *Jurnal Administrasi Bisnis: Analisis Pengembangan Wisata Pantai Indah Popoh sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Tulungagung*. Vol. 26 No. 2. Malang: Universitas Brawijaya.
- Huda, Nurul. 2008. Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lestari, Endang dan Jangkung Prasetyo. 2014. *Jurnal Ilmiah Pendidikan: Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seks Sedin Mungkin di TK Mardisiwi Desa Kedondong Kec. Kebonsari Kabupaten Madiun*. ISSN 2354-5968. Magetan: STKIP.
- Nasir, Ahmad. 2016. *eJournal Administrasi Negara: Studi tentang Strategi Humas PT. PLN Persero dalam Mempromosikan Listrik Prabayar di Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Nawawi, Ahmad. 2013. *Jurnal Nasional Pariwisata: Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan wisata pantai Depok di Desa Kretek*. Jogjakarta: UGM
- Nurharjadmo, Wahyu. 2008. *Jurnal Evaluasi: Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan*. Vol. 4, No. 2. ISSN 1907-0489. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Oktavia, Melly, dkk. Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi pada Penyeberangan Lintas Kalianget-Talango dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (Studi pada UPT. Pelabuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep. Sumenep: Universitas Wiraraja.
- Pamungkas, Gilang. 2013. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota: Ekowisata Belum Milik Bersama: Kapasitas Jejaring Stakeholder dalam Pengelolaan Ekowisata (Studi Kasus: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango)*. Vol. 24 No. 1. Bandung: PT. Aria Ripta Sarana.
- Pratikto, Widi. 2006. *Promoting Coastal Areas and Small Island*. Ditjen KP3k
- Primadany, Sefira Ryalita, dkk. 2004. *Jurnal Administrasi Publik: Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata daerah Kabupaten Nganjuk)*. Vol. 1, No. 4. Malang: Universitas Brawijaya.
- Raharjana, Destha Titi. 2012. *Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau*. Vol. 2. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ramadana, Coristya Berlian, dkk. *Jurnal Administrasi Publik: Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang)*. Vol. 1. No. 6. Malang: Universitas Brawijaya.
- Safitri, Sri O. 2013. *JNP: Dampak Sosial Budaya Interaksi Wisatawan dengan Masyarakat Lokal di Kawasan Sosrowijayan*. Vol. 5. No. 3. Yogyakarta: UGM
- Said, La Ode Agus, dkk. 2015. *JISIP: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau*. ISSN 2442-6962. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sudarma. Ketut. 2012. *JDM: Mencapai Sumber Daya Manusia Unggul (Analisis Kinerja dan Kualitas Pelayanan)*. ISSN 2337-5434 (online). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sutarso, Joko. 2015. *Menggagas Pariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal*. Surakarta: UMS.
- Talumewo, Pingkan O.E., dkk. 2014. *Jurnal EMBA: Analisis Rantai Pasok Ketersediaan Bahan Baku di Industri Jasa Makanan Cepat Saji pada KFC Multimart Ranotana*. ISSN 2303-1174. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Tamodia, Widya. 2013. *Jurnal EMBA: Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern untuk Persediaan Barang Dagangan pada PT. Iaris Manis Utama cabang Manado*. ISSN 2303-1174. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Wariyah, Dr. Ir. Ch. M.P. 2014. *Jurnal Sosio-Humaniora*. ISSN: 2087-1899. Vol. 5 No. 1. Jogjakarta: LPPM Universitas Mercu Buana.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kawasan Pantai Boom Antara PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Wangi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/61/429.012/2015 dan Nomor: HK.0501/04/TWI-2015.

Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/471/KEP/429.011/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Boom Banyuwangi Kepada Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Internet

Coral Triangle Initiative. 2007. *On Coral Reefs, Fisheries And Food Security*. www.coraltriangleinitiative.org. (diakses pada tanggal 9 Juni 2015)

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2011. *Rangking Devisa Pariwisata terhadap Komoditas Ekspor Lainnya tahun 2004-2009*. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_di_Indonesia. (diakses pada tanggal 10 Juni 2015)

Badan Pusat Statistik. 2013. *Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen Hasil SBH 2012*. www.bps.go.id. (diakses pada tanggal 12 September 2015)

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. 2015. Muara Pantai Boom Banyuwangi Tercemar Limbah Industri. <http://m.tempo.co/read/news/2015/05/08/206664737/muara-pantai-boom-banyuwangi-tercemar-limbah-industri>. (diakses pada tanggal 21 Mei 2016)

Lain -lain

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 2015. Workshop Pengembangan Masterplan Pembangunan Kawasan Pantai Boom Banyuwangi. Banyuwangi: Bappeda Kab. Banyuwangi

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. 2009. Masterplan Pelabuhan Boom Banyuwangi tahun 2008-2028. Banyuwangi: Dishubkominfo

Pelindo III. 2016. Laporan Keuangan Konsolidasi Pelindo III per 31 Desember 2016. Surabaya: Pelindo III

PEDOMAN WAWANCARA I

Nama Informan :
Usia :
Jabatan :
Instansi :

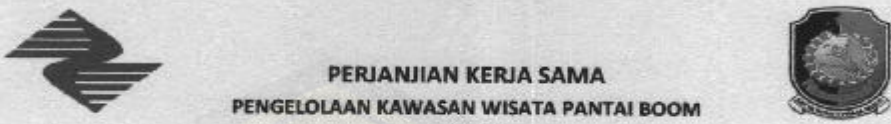
Faktor	
	<ol style="list-style-type: none">1. Menurut Bapak, bagaimana rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan pantai Boom?2. Berapa total investasi dan pembangunan kawasan pantai boom?3. Bagaimana penanganan wisata pantai boom?4. Apa yang menjadi masalah dalam mengelola pantai boom?5. Apa bentuk kepedulian dari pemerintah/pelindo sendiri?6. Apa yang dilakukan oleh dinas terkait?7. Bagaimana peran dari pegawai dinas sendiri?8. bagaimana dukungan masyarakat terkait pengelolaan kawasan pantai boom sendiri?9. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kunjungan wisatawan?10. Sampai sejauh mana yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai penanganan pantai boom?

PEDOMAN WAWANCARA II

Nama Informan :
Usia :
Pekerjaan :

Pertanyaan	
	<ol style="list-style-type: none">1. Menurut Bapak/ibu pantai boom akan diapakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi?2. Bagaimana menjaga pantai boom menurut Bapak/ibu?3. Bagaimana kondisi pantai boom sebelumnya?4. Apakah Bapak/ibu mendukung program pemerintah mengelola pantai boom ini?5. Bagaimana kondisi pantai boom sekarang ini menurut bapak/ibu?

LAMPIRAN I



PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGLOLAAN KAWASAN WISATA PANTAI BOOM
ANTARA
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 188/ 61 /429.012/2015
Nomor : HK.0501/04/TWI-2015

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas (19-03-2015), bertempat di Benoa - Bali, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara :

1. BANGUN SWASTANTO	: General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Wangi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP.714/KP.0403/P.III-2011 tanggal 08 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ; -----
2. M.Y. BRAMUDA, S.Sos, MBA, MM	: Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 78 Banyuwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/471/KEP/429.011/2014, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ; -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan hukum Indonesia, berbentuk perseroan terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Pelayanan Jasa Kepelabuhan serta bertindak sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.88 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 yang mengelola Pelabuhan Umum pada tujuh wilayah provinsi Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki program pembangunan kepariwisataan di wilayahnya sebagai salah satu kewenangannya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Banyuwangi, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengembangkan Wisata Pantai Boom yang berada pada Tanah Hak Pengelolaan **PIHAK KESATU** di Pelabuhan Cabang Tanjung Wangi Banyuwangi menjadi daerah wisata Pantai Boom.

Page 1 of 7

Selanjutnya, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Boom (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat umum sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
5. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.40 tahun 1999 tentang Batas – batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Banyuwangi.
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 47 tahun 2004 tentang Pelabuhan Laut yang diselenggarakan / dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
17. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: PER.57/PJ.06/P.III-2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: PER.55.1/PJ.06/P.III-2012 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyerahan Penggunaan Bagian - Bagian Tanah, Perairan dan Ruang / Bangunan Pelabuhan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
18. Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Wangi Nomor: 188/758/429.012/2014 & HK.04/03/TWI-201 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Boom Banyuwangi.
19. Surat Persetujuan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: PJ.03/10/P.III-2015 tanggal 2 Pebruari 2015 Perihal Persetujuan Kerja sama pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Boom di Banyuwangi.

Pasal 2**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program kegiatan PARA PIHAK dalam upaya pengelolaan di Kawasan Pantai Boom Pelabuhan Cabang Tanjung Wangi yang dikelola PIHAK KESATU, guna mendukung rencana pengembangan potensi pariwisata di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dikelola PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekonomi dan keuangan atas Kawasan Pantai Boom Pelabuhan Cabang Tanjung Wangi yang dikelola PIHAK KESATU dan untuk meningkatkan pendapatan PARA PIHAK serta memberdayakan potensi masyarakat sekitar Kawasan Pantai Boom dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 3**OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Obyek kerjasama berada di dalam Kawasan Pantai Boom Pelabuhan Cabang Tanjung Wangi milik PIHAK KESATU yang selanjutnya dikelola oleh PIHAK KEDUA dengan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 12.37.16.13.5.00001 Tanggal 18 Februari 1999, dalam rangka mendukung rencana dan program PIHAK KEDUA sebagai Kawasan Wisata Pantai Boom;
- (2) Ruang Lingkup Kerjasama :
 - a. Pengelolaan tiket masuk;
 - b. Pengelolaan jasa parkir kendaraan;
 - c. Pengelolaan untuk kegiatan usaha kecil di Kawasan Pantai Boom;
 - d. Pemeliharaan kebersihan dan pertamanan di Kawasan Pantai Boom sekitarnya;
 - e. Pemeliharaan dan pengamanan lokasi di Kawasan Pantai Boom sekitarnya;
 - f. Promosi dan pemasaran Kawasan Pantai Boom.

Pasal 4**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Memperoleh seluruh hasil pendapatan kotor dari pengelolaan obyek dalam kawasan wisata dimaksud pada perjanjian ini sebelum diperhitungkan besarnya pembagian pendapatan dalam rekening bersama (escrow account) atas nama **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan promosi dan pemasaran Pantai Boom dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memperoleh pembagian pendapatan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Bersama-sama PIHAK KEDUA dapat menyusun Master Plan pengembangan Kawasan Pantai Boom menjadi Kawasan Wisata Pantai Boom;
 - b. Bersama-sama PIHAK KEDUA dapat mengembangkan dan membangun sarana prasarana dan utilitas fasilitas pendukung di Kawasan Wisata Pantai Boom;
 - c. Menganggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk pembangunan sarana prasarana dan utilitas yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan Kawasan Pantai Boom sesuai kesepakatan dalam Master Plan dan ketentuan yang berlaku;

- d. Bersama-sama PIHAK KEDUA menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan Kawasan Wisata Pantai Boom dan sekitarnya;
- e. Memberikan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai Kawasan Pantai Boom yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini;
- f. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata di kawasan Wisata Pantai Boom;
- g. Dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Kawasan Pantai Boom dan masyarakat sekitarnya di bidang pariwisata;
- h. Memberikan bagi hasil dari hasil kegiatan di Kawasan Wisata Pantai Boom kepada PIHAK KEDUA;
- i. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KESATU mengenai kondisi lokasi Pantai Boom yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
 - b. Memperoleh pembagian hasil kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Bersama-sama PIHAK KESATU dapat menyusun *Master Plan* Kawasan Pantai Boom menjadi Kawasan Wisata Pantai Boom;
 - b. Bersama-sama PIHAK KESATU mengembangkan dan membangun sarana prasarana dan utilitas di Kawasan Pantai Boom;
 - c. Menganggarkan dalam APBD untuk pembangunan sarana prasarana dan utilitas yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan Kawasan Wisata Pantai Boom sesuai kesepakatan dalam Master Plan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Bersama-sama PIHAK KESATU menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan Kawasan Wisata Pantai Boom dan sekitarnya;
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Kawasan Wisata Pantai Boom dan masyarakat sekitarnya di bidang pariwisata;
 - f. Bersama - sama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan usaha pariwisata di kawasan Pantai Boom.
 - g. Bersama - sama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama;

Pasal 6

PEMBAGIAN PENDAPATAN

- (1) Nilai pembagian pendapatan yang dibagikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah semua pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Boom setelah dikurangi pajak, asuransi dan biaya-biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibagi untuk masing-masing PIHAK sebesar 50% (lima puluh persen).

- (2) Nilai pembagian pendapatan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Penyerahan pembagian pendapatan akan diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pencocokan oleh PARA PIHAK dan akan dilaksanakan setiap bulan yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Penyerahan pembagian pendapatan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU, dan akan disetor kepada rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA kepada Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Bank Jatim dengan Nomor Rekening **002.1000.700**.

Pasal 7

PAJAK - PAJAK

Pajak-pajak yang akan timbul akibat perjanjian kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8

SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) PARA PIHAK wajib menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai keahlian di bidang administrasi dan keuangan yang diperlukan.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat sekitarnya, PARA PIHAK dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk memberdayakan penduduk lokal dalam pengelolaan Kawasan Pantal Boom.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pembahasan perpanjangan perjanjian kerja sama dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi dan monitoring bersama terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, maka PARA PIHAK berhak melakukan penilaian dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Pasal 11**LARANGAN**

- (1) PARA PIHAK dilarang mengalihkan kepada pihak lain manapun baik sebagian maupun secara keseluruhan dari obyek yang dikerjasamakan dalam Perjanjian ini, tanpa persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (2) PARA PIHAK dilarang menjaminkan/mengagunkan baik sebagian maupun seluruhnya dari objek kerjasama dalam Perjanjian ini kepada pihak bank atau manapun.

Pasal 12**WANPRESTASI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Dalam hal pemutusan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK KESATU dapat memutuskan perjanjian kerja sama ini secara **sepihak**.
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU melakukan wanprestasi sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK KEDUA dapat memutuskan perjanjian kerja sama ini secara **sepihak**.
- (4) Mekanisme pemutusan perjanjian dilakukan setelah dilakukan teguran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, berupa surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing surat teguran 1 (satu) bulan.
- (5) Teguran / peringatan yang dimaksud ayat (4) dilakukan setelah PIHAK KEDUA atau PIHAK KESATU melakukan:
 - a. Secara langsung atau tidak langsung sengaja mengadakan kegiatan usaha yang dapat merugikan PIHAK lainnya;
 - b. Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan salah satu PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini; dan/atau
 - c. Menyerahkan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Boom kepada PIHAK lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan PIHAK lainnya.

Pasal 13**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Salah satu atau kedua belah PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, apabila PIHAK atau PARA PIHAK tersebut mengalami hambatan yang disebabkan karena keadaan kahar / *force majeure*, sehingga PIHAK yang mengalami hambatan keadaan kahar / *force majeure* harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang dan resiko yang terjadi menjadi resiko masing-masing PIHAK.
- (2) Yang dimaksudkan dengan keadaan kahar / *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, angin topan, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemogokan massal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru-hara, kebakaran dan sejenisnya.

- (3) Kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK karena keadaan kahar / *force majeure* bukan merupakan resiko dan/atau tanggung jawab PIHAK lainnya, dan kedua belah PIHAK dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap resiko atau akibat *keadaan kahar / force majeure*.
- (4) PIHAK yang terkena keadaan kahar / *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak terjadinya keadaan kahar / *force majeure*.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK berkaitan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat melalui perundingan antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya.

Pasal 15
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dokumen – dokumen milik PIHAK lain, termasuk peta – peta yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini tidak dapat diubah ataupun diganti yang dapat berpengaruh terhadap akibat hukum dan kekuatan hukum perjanjian ini, kecuali disepakati dan dinyatakan secara tertulis serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sebagai, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

M. Y. BRAMUDA, S.Sos, MBA, MM

PIHAK KESATU,

BANGUN SWASTANTO

LAMPIRAN II

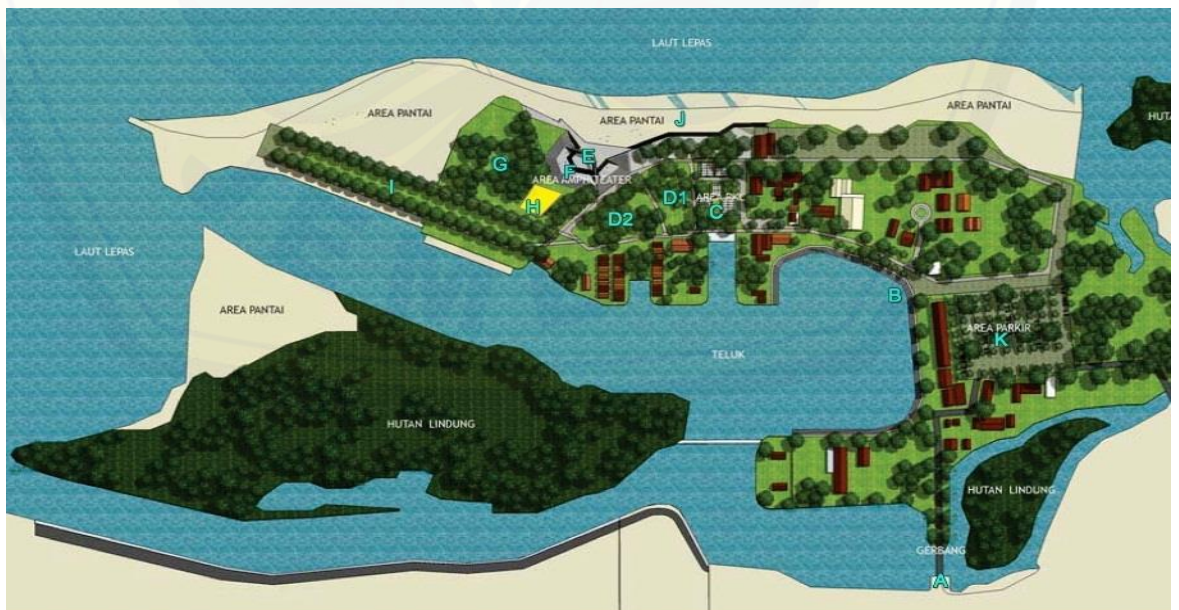
Foto Progres Pembangunan Kawasan Pantai Boom Banyuwangi

Gambar 1. *Layout* Pengembangan Wisata pantai Boom Tahun 2012



(Sumber: Masterplan Pelabuhan Boom Banyuwangi tahun 2008-2028)

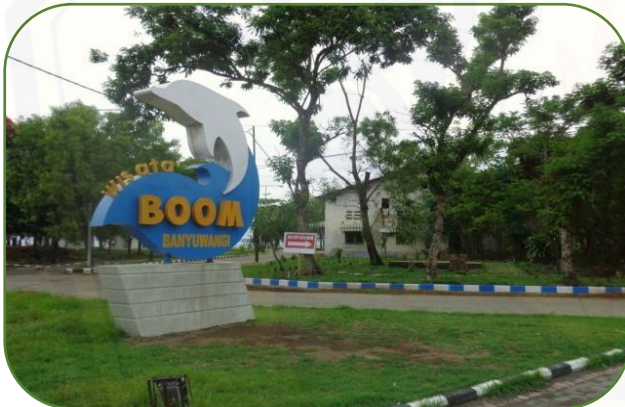
Gambar 2. Konsep Penataan Area Wisata Boom tahun 2015



(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2015)



Gambar 3. Pencapaian Pembangunan *Amphiteather*
(Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemkab. Banyuwangi)



Gambar 4 Pencapaian Pembangunan Papan Nama Dan Jalan Masuk
(Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemkab. Banyuwangi)



Gambar 5 Pencapaian Pembangunan Pavingisasi Dan Rumput Taman
(Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemkab. Banyuwangi)



Gambar 6 Pencapaian Muara Dan Pinggir Pantai Boom
(Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemkab. Banyuwangi)

LAMPIRAN III

GIAT DI PANTAI BOOM BANYUWANGI



Gambar 1 (foto kiri) Foto sampah di pantai boom tanggal 15 Juni 2014 (foto kanan) Dubes Amerika dan Bupati Banyuwangi memungut sampah di Pantai Boom tanggal 21 November 2014

(Sumber: www.banyuwangikab.go.id, tahun 2015)



Gambar 2 penyu bertelur disaksikan warga dan turis di pantai boom pada tanggal 5 juni 2014

(Sumber: www.btsf.org)



Gambar 3 Event Banyuwangi festival yang diselenggarakan di pantai Boom Banyuwangi yakni jazz pantai yang dimeriahkan salah satunya oleh Once dewa 19 dan gandrung sewu